

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SUMOBITO



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan memperhatikan kebijakan terbaru terkait penguatan kualitas indikator kinerja, keselarasan (cascading) kinerja, serta hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKjIP Kecamatan Sumobito ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Sumobito, 5 Januari 2026

HERU CAHYONO, S.Sos.,M.Si
NIP 19680803 199003 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i

Daftar Isi.....ii

BAB I Pendahuluan.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....2

1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah.....8

1.4 Isu Strategis.....9

BAB II Perencanaan Kinerja.....13

2.1 Perencanaan strategis.....13

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....22

2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....26

BAB III Akuntabilitas Kinerja.....30

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....31

3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi dari Tahun ke Tahun.....32

3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....33

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 tahun terakhir.....41

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah
Yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....42

3.1.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini sampai dengan realisasi kinerja di level
Nasional.....44

3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....45

3.2 Realisasi Anggaran.....52

BAB IV Penutup.....65

4.1 Kesimpulan.....65

4.2 Inovasi dan Penghargaan.....66

4.3 Upaya Perbaikan.....68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu laporan kinerja tahunan yang merupakan komponen dari instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi. Komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran serta pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumobito berisi pelaporan atas pencapaian kinerja organisasi yang dihasilkan berupa capaian dari pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai sasaran strategis yang membandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja kecamatan serta peningkatan kualitas dalam pelayanan publik, maka analisis kinerja diperlukan dengan melakukan klarifikasi output dan outcome suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sumobito sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan yang dibuat secara sistematis ini memuat seluruh informasi tentang pencapaian kinerja suatu organisasi yang terdiri atas perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, realisasi kinerja dua tahun terakhir dan realisasi kinerja di level nasional/provinsi. Selain itu, Laporan ini juga memuat informasi kualitas atas capaian kinerja, informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Sumobito diwajibkan untuk menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
 - e. Seksi Sosial Budaya
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, serta melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan kecamatan.

- Pengoordinasian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja;
- Pengelolaan keuangan
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi umum;
- Pengoordinasian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengoordinasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- Pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- Koordinasi pelaksanaan tugas unit kerja;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan

administrasi perjalanan dinas;

- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian

kependudukan dan catatan sipil;

- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

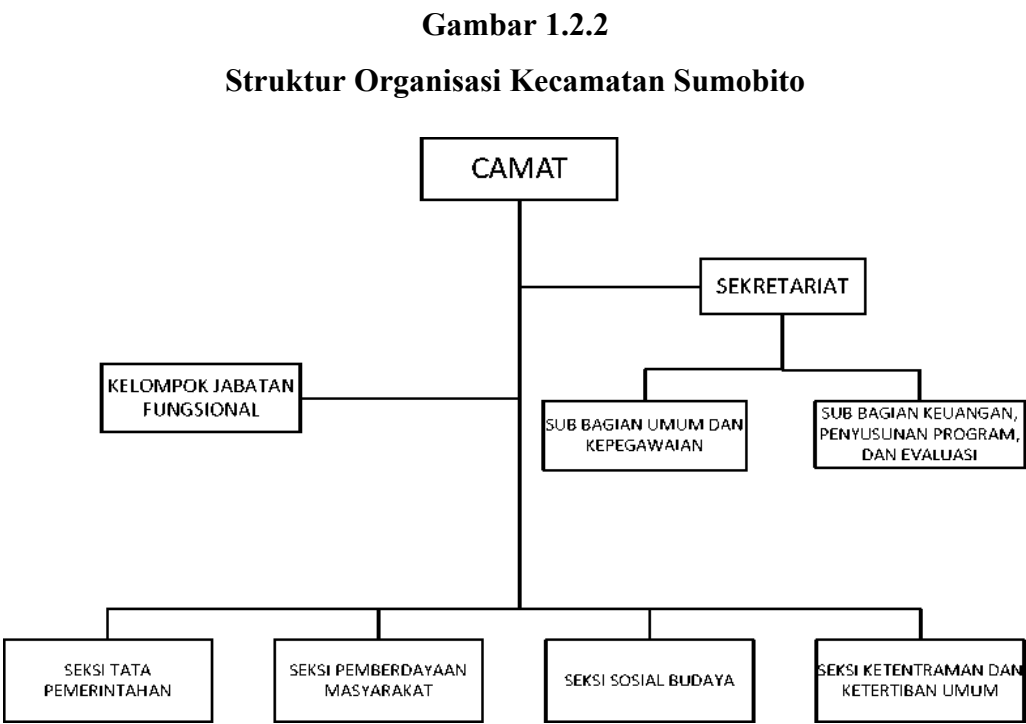
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

- pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Sumobito tersaji dalam Gambar 1.2.2



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Kantor Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.2.1
Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	9
3	Golongan II	2
	Golongan V	0
4	PPPK	3
Jumlah		16

Sumber data : SIAP ASN

Dari tabel tingkat golongan diatas dapat terbaca bahwa, tingkat golongan dari personil Kantor Kecamatan Sumobito yang terbanyak golongan III, sebanyak 9 orang. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup

secara umum untuk menangani kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana, baik dengan latar belakang teknis maupun sosial.

Tabel 1.2. 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Eselon

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	-
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	6
4	Pelaksana	5
5	PPPK	3
Jumlah		16

Sumber data : SIAP ASN

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai paling banyak adalah Jabatan Eselon IV, sebesar 6 pegawai dan paling sedikit adalah Eselon III.

Tabel 1.2.2. 2
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

Golongan	Jumlah Pegawai
SLTP	0
SLTA	5
Diploma (D3)	1
Sarjana (S1)	8
Magister (S2)	2
Jumlah	16

Sumber data : SIAP ASN

1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan Sumobito sebagai perangkat daerah memiliki mandat untuk melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik di wilayah kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai perangkat daerah yang berada di garis terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Sumobito memiliki peran strategis sebagai berikut:

- 1. Sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan

Kecamatan Sumobito berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan

kegiatan lintas perangkat daerah di tingkat kecamatan serta memastikan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah kabupaten dengan pelaksanaan di desa.

2. Sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa

Kecamatan berperan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sebagai penyelenggara pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat

Kecamatan Sumobito menjadi ujung tombak pelayanan administratif, seperti pelayanan kependudukan, perizinan tertentu, serta fasilitasi kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan terjangkau.

4. Sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif

Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, termasuk melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta mendukung peningkatan kapasitas masyarakat.

5. Sebagai penjaga stabilitas wilayah (trantibum)

Kecamatan berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah desa.

6. Sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat

Kecamatan menjadi jembatan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah daerah sekaligus menampung aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke tingkat kabupaten.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. a. Perlunya peningkatan kualitas SDM di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Isu ini muncul karena masih terdapat keterbatasan kapasitas aparatur kecamatan dan desa/kelurahan dalam aspek kompetensi teknis, manajerial, serta pemahaman regulasi. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Selain itu, dinamika kebijakan dan tuntutan reformasi birokrasi menuntut aparatur yang profesional, adaptif terhadap teknologi informasi, serta berorientasi pada kinerja dan pelayanan masyarakat.

b. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sarana dan prasarana pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Beberapa fasilitas pelayanan belum memenuhi standar

pelayanan minimal, kurang terawat, serta belum sepenuhnya mendukung penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini berpengaruh terhadap kenyamanan, kecepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan publik.

- c. Peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga dan pemberdayaan desa/kelurahan belum optimal dalam pembangunan desa

BUMDesa, BUMDesma, serta lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa. Namun dalam pelaksanaannya, peran tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas pengelolaan, permodalan, inovasi usaha, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Akibatnya, potensi ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- d. Penguatan wawasan kebangsaan

Penguatan wawasan kebangsaan menjadi isu strategis seiring dengan dinamika sosial masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta potensi munculnya paham-paham yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI kepada aparaturnya maupun masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang kondusif

- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, adalah:

- a. Masih terbatasnya kompetensi aparaturnya OPD, kecamatan, dan desa/kelurahan dalam aspek teknis, manajerial, serta pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru dan implementasi reformasi birokrasi serta SAKIP.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan sesuai standar pelayanan minimal.
- d. Terbatasnya dukungan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelayanan publik berbasis digital.
- e. Masih rendahnya kapasitas manajerial dan kewirausahaan pengelola BUMDesa dan BUMDesma
- f. Rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap peran BUMDesa dan lembaga desa dalam pembangunan ekonomi lokal.

- g. Masih terbatasnya intensitas pembinaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- h. Pengaruh negatif perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang berpotensi memicu disinformasi dan konflik sosial.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang berkaitan dengan isu strategis tersebut, Kecamatan perlu melakukan upaya penanganan secara terpadu dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan dan desa/kelurahan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kebutuhan kinerja, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan pemahaman terhadap regulasi, reformasi birokrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik diatasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan secara bertahap, pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pelayanan sesuai standar, serta optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi dan penganggaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan peran BUMDesa, BUMDesma, dan lembaga desa/kelurahan dalam pembangunan, Kecamatan mendorong penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya agar potensi ekonomi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, penguatan wawasan kebangsaan dilaksanakan melalui pembinaan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI secara berkelanjutan dengan melibatkan aparatur, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan, sehingga tercipta stabilitas sosial dan kondusivitas wilayah yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Uraian ini dapat digunakan sebagai landasan strategi Kecamatan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumobito pada tahun 2025 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut selaras dengan misi Bupati Jombang yakni: “Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (open & collaborative governance), melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi melalui transformasi digital dan perluasan partisipasi publik”. dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sumobito juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Value For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa dilaksanakan melalui penguatan peran kecamatan dalam koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memastikan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa dengan kebijakan, program, serta prioritas pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan intensitas koordinasi lintas sektor, pembinaan administrasi pemerintahan desa, serta pendampingan dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu, kecamatan mendorong sinergi antar desa, OPD terkait, dan lembaga kemasyarakatan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Dengan penguatan fungsi koordinatif tersebut, diharapkan penyelenggaraan kegiatan di desa dapat berjalan tertib, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis,serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Sumobito pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan

pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sumobito adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan:

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapanganPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.1 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Rencana Kerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumobito	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,5	Nilai Evaluasi AKIP tahun n
1	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	N/A	

	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	N/A	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) tahun n
2	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun tahun n
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun tahun n
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tahun n
	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tahun n
	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun tahun n
	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun tahun n

3	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	13	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia
	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	13	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia tahun n
4	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia tahun n
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia tahun n
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia tahun n
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia tahun n
	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia tahun n
	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia tahun n
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia tahun n
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia tahun n

	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n
5	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia tahun n
	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia tahun n
6	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia tahun n
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia tahun n
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia tahun n
	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia tahun n
7	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	18	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi tahun n
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi tahun n

	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi tahun n
	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	18	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi tahun n
	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Sumobito	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun n
8	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun n
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun n
	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun n
	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun n
	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Sumobito	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun n

9	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	126	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun n
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun n
	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	126	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun n
	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun n
	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sumobito	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun n
10	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun n
	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun n
	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun n

		Pemerintahan Umum Kecamatan Sumobito			
11	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun n
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	150	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun n
	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	150	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun n
	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun n
	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Sumobito	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun n
12	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	42	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun n
	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	42	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun n

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara

Bupati Jombang dan Camat Sumobito atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumobito Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sumobito Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Sumobito untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.2.1
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUMOBITO TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Sumobito	73,50
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Sumobito	8,15

Tabel 2.2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN SUMOBITO TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di 24 tingkat Kecamatan	1. Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,15
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	72,95

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumobito	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73,50	Rp. 2.948.702.450
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Sumobito	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	Rp. 14.241.850
3.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Sumobito	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	Rp. 80.765.000
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sumobito	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	Rp. 13.779.700
5.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Sumobito	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	Rp. 12.314.500
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Sumobito	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	Rp. 114.394.050
					Rp. 3.184.197.550

2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Sumobito Tahun 2026 merupakan dokumen yang memuat komitmen kinerja antara Camat Sumobito dengan Bupati Jombang dalam rangka mewujudkan target kinerja yang terukur dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, serta memperhatikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sumobito Tahun 2026.

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja diawali dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis kecamatan dengan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya dilakukan perumusan tujuan dan sasaran kinerja yang mencerminkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumobito, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Indikator kinerja disusun dengan memperhatikan prinsip spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai, serta diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan dan indikator kinerja daerah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Sumobito dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama tahun 2026

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus penghitungan/formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di 27 tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan yang mencakup atas aspek 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; 4. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; 5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan 6. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	CAMAT SUMOBITO
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks Kualitas Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut KPP adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP $IKPP = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$	Hasil Penilaian IKPP Kec.Sumobito	CAMAT SUMOBITO
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (bobot 10) + Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (bobot 90)	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kec Sumobito	CAMAT SUMOBITO

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Sumobito yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2026 maka dalam Penetapan target kinerja Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2025, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Selain itu, target juga disesuaikan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renja dan RKA Tahun 2026, sehingga mencerminkan kesinambungan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Dalam hal terdapat perubahan organisasi, baik berupa penyesuaian struktur, nomenklatur program dan kegiatan, maupun perubahan regulasi, maka dilakukan penyesuaian terhadap indikator dan target kinerja agar tetap relevan dan akuntabel.

Substansi Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumobito Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Fokus utama kinerja diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Indikator yang digunakan antara lain mencerminkan tingkat ketepatan waktu pelayanan administrasi, kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta kondisi stabilitas wilayah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam mendukung akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumobito, sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan.

Tabel 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUMOBITO TAHUN 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	76
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,87
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	73,90

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.2.246.099.257	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.12.195.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.28.325.000	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.7.000.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.89.775.000	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.7.010.000	APBD
	Rp.2.390.404.257	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui sistem pelaporan kinerja yang disusun secara periodik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Sumobito sebagai perangkat daerah yang mengemban misi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur secara rinci format, sistematika, dan mekanisme penyusunan LKjIP. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran strategis Kecamatan Sumobito. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai pada tahun pelaporan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis. Penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan cara menghitung rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Hasil tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan Kecamatan Sumobito dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Skala tersebut digunakan untuk menginterpretasikan tingkat capaian kinerja, mulai dari kategori sangat memuaskan hingga kategori kurang, sehingga hasil pengukuran kinerja dapat dipahami secara lebih objektif dan terstandar. Untuk mempermudah dalam interpretasi dalam pencapaian indikator kinerja, digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

NO.	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	>100% - 110%	: Istimewa (Sangat Berhasil)
2.	>80% - 100%	: Baik (Berhasil)

3.	>60% - 80%	: Butuh Perbaikan (Cukup)
4.	>20% - 60%	: Kurang
5	0% - 20%	: Sangat Kurang

Sumber: Perbup Nomor 37 Tahun 2025

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 110% dilakukan pengambilan nilai batas maksimal sebesar 110%. Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama dengan 0%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Sumobito memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 serta Renja Perubahan 2025.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi merupakan gambaran tingkat keberhasilan Kecamatan Sumobito dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Capaian ini diperoleh dari hasil pengukuran kinerja atas indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun Pelaporan.

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai selama satu tahun anggaran. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya diinterpretasikan menggunakan skala pengukuran yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Secara umum, capaian kinerja organisasi Kecamatan Sumobito menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan rencana yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya kinerja organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja organisasi merupakan hasil akumulasi dari capaian seluruh indikator kinerja sasaran strategis. Penyimpulan capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan Kecamatan Sumobito dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari

guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun

Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Sumobito selama periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada Tahun 2021, capaian kinerja berada pada angka 97,92 yang mencerminkan kinerja organisasi dalam kategori baik dan mendekati target yang telah ditetapkan. Namun demikian, pada Tahun 2022 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 82,31, yang mengindikasikan adanya kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, pada Tahun 2023 capaian kinerja mengalami peningkatan yang cukup tajam menjadi 100,19. Capaian ini menunjukkan bahwa organisasi mampu melakukan perbaikan dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Tren positif ini berlanjut pada Tahun 2024 dengan capaian sebesar 103,87 yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengukuran, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi pada tahun tersebut sangat optimal. Akan tetapi, pada Tahun 2025 kembali terjadi penurunan capaian kinerja menjadi 87,88. Meskipun masih berada pada kategori cukup baik, penurunan ini menunjukkan bahwa konsistensi kinerja organisasi belum sepenuhnya terjaga dan masih memerlukan perhatian lebih.

Secara keseluruhan, capaian kinerja organisasi selama lima tahun terakhir tergolong baik, namun belum stabil karena masih mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi faktor penyebab penurunan kinerja serta mempertahankan dan mereplikasi strategi yang telah berhasil pada periode dengan capaian kinerja tinggi. Adapun kurva yang menggambarkan capaian kinerja organisasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Data capaian kinerja Tahun 2021-2023 : capaian kinerja sesuai LKJIP
Data capaian kinerja Tahun 2024-2025 : capaian kinerja hasil perhitungan PKO

Dari gambar kurva diatas fluktuasi capaian kinerja organisasi Kecamatan Sumobito selama periode Tahun 2021–2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan nilai capaian yang naik dan turun setiap tahun menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya konsisten.

Dari sisi internal, fluktuasi dapat disebabkan oleh perbedaan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program/kegiatan pada masing-masing tahun. Pada saat perencanaan dan koordinasi berjalan optimal, seperti yang tercermin pada Tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja meningkat secara signifikan bahkan melampaui target. Sebaliknya, pada tahun dengan capaian yang menurun, seperti Tahun 2022 dan 2025, dimungkinkan terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan, keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pemanfaatan anggaran, maupun lemahnya monitoring dan evaluasi.

Dari sisi eksternal, fluktuasi juga dapat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintah, perubahan regulasi, serta kondisi lingkungan strategis yang tidak selalu dapat diprediksi. Misalnya, adanya perubahan prioritas pembangunan daerah, refocusing anggaran, atau kondisi tertentu yang menghambat pelaksanaan kegiatan dapat berdampak langsung terhadap capaian kinerja organisasi.

Dengan demikian, fluktuasi capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa organisasi masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan yang lebih matang, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi agar capaian kinerja ke depan dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumobito Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Sumobito

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK (7) X (100%-(8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	62,37	83,16%	83,16%	8,32%	76,24%

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,15	8,85	108,59%	108,59%	10,86%	96,80%
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	72,95	73,81	101,18%	101,18%	10,12%	90,94%
Total Capaian PK (10)								263,98%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK s.d TB 4 (11)								87,88%
Predikat PKO s.d TB 4 (12)								BAIK

Berdasarkan tabel capaian kinerja, dapat diketahui bahwa Kecamatan Sumobito telah menetapkan tiga sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja masing-masing. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup optimal dengan nilai akhir kinerja organisasi sebesar 87,88% dan memperoleh predikat “BAIK”.

1. Pada sasaran pertama, yaitu *meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan*, dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, ditetapkan target sebesar 75 dan terealisasi sebesar 62,37. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 83,16%, yang menunjukkan bahwa realisasi belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan normalisasi dan koreksi berdasarkan predikat AKIP sebesar 8,32%, diperoleh nilai akhir capaian sebesar 76,24%. Hal ini mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. Pada sasaran kedua, yaitu *meningkatkan kualitas pelayanan publik*, dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik, target yang ditetapkan sebesar 8,15 dan realisasi mencapai 8,85. Capaian kinerja mencapai 108,59%, yang berarti telah melampaui target yang ditentukan. Setelah dilakukan normalisasi dan koreksi sebesar 10,86%, nilai akhir capaian indikator ini sebesar 96,80%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berjalan sangat baik dan menjadi salah satu kekuatan utama organisasi. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif.
3. Selanjutnya, pada sasaran ketiga, yaitu *terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif*, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, target sebesar 72,95 dan realisasi sebesar 73,81. Capaian kinerja sebesar 101,18% menunjukkan bahwa target telah terlampaui. Setelah dilakukan normalisasi dan koreksi sebesar 10,12%,

diperoleh nilai akhir capaian sebesar 90,94%, yang menunjukkan kinerja tata kelola birokrasi sudah berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, total capaian kinerja mencapai 263,98%, dengan nilai rata-rata (Nilai Kinerja Organisasi/NKO) sebesar 87,88%. Nilai tersebut menempatkan kinerja Kecamatan Sumobito dalam kategori “BAIK”. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah tercapai bahkan melampaui target, meskipun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan agar capaian kinerja organisasi ke depan dapat lebih optimal dan konsisten.

Namun demikian, tujuan meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan meskipun telah mencapai kategori berhasil, masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut. Kesenjangan antara target dan realisasi mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi penerapan sistem kinerja berbasis hasil agar capaian kinerja ke depan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumobito Tahun 2025 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumobito	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,5	71,7	97,55
1	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	100
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	100
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	N/A	N/A	N/A

	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	100
	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	100
	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	N/A	N/A	100
2	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	100
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	100
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	100
	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	100
	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	100
	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	100
3	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	13	13	100

	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	13	13	100
4	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	100
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	100
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	100
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	100
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	100
	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	100
	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	100
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	100
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	100
	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	100

5	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	100
	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	100
6	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	24	100
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100
	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	24	100
7	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	100
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	18	18	100
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	100
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	100

	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	100
	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	18	18	100
	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Sumobito	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76	70,34	92,55
8	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	100
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	100
	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	100
	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	100
	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Sumobito	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75	68,75	91,67
9	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	126	126	100

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	100
	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	126	126	100
	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	100
	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sumobito	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49	28,17	57,49
10	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	100
	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	100
	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Sumobito	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75	29,17	38,89
11	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	100

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	150	150	100
	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	150	150	100
	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	100
	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Sumobito	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75	37,5	50,00
12	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	42	42	100
	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	42	42	100

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.1.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	N/A	N/A	62,37
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,68	8,14	8,85
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	71,58	72,91	73,81

Tabel tersebut menyajikan perkembangan realisasi capaian indikator kinerja utama Kecamatan untuk periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 yang menggambarkan tren peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada tujuan meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan. Berdasarkan tabel, pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 indikator ini belum dilakukan pengukuran atau belum tersedia data (N/A). Pengukuran baru dilakukan pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 62,37. Nilai ini menjadi baseline awal yang penting sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja kecamatan pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus sebagai acuan dalam menetapkan target kinerja yang lebih terukur dan realistis.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Pelayanan Publik. Realisasi capaian menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023 nilai indeks tercatat sebesar 7,68, meningkat menjadi 8,14 pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 8,85 pada Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem dan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan orientasi pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, pada tujuan terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, indikator yang digunakan adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Realisasi nilai indeks menunjukkan peningkatan secara bertahap dan konsisten, yaitu 71,58 pada Tahun 2023, meningkat menjadi 72,91 pada Tahun 2024, dan mencapai 73,81 pada Tahun 2025. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan perangkat daerah berjalan dengan baik, ditandai dengan penguatan akuntabilitas kinerja, perbaikan tata kelola, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan adanya kemajuan kinerja yang positif dari tahun ke tahun, khususnya pada aspek pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pengukuran Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan pada Tahun 2025 menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat sistem evaluasi kinerja kecamatan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Meskipun pencapaian kinerja kecamatan sumobito telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun masih terdapat hambatan yang dihadapi yaitu:

1. Tahap awal IKKK, pemahaman pegawai masih terbatas
2. Meskipun capaian meningkat, masih terdapat tantangan dalam konsistensi pengumpulan data dan monitoring berkala.

3. Tersediaan SDM pendukung kinerja masih terbatas.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, seperti pelatihan teknis yang terstruktur, optimalisasi penggunaan aplikasi digital (e-SAKIP, e-Kinerja), serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah guna mendukung kecamatan dalam menjalankan fungsi manajemen kerjanya secara efektif dan efisien.

- 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	77,5	62,37	80,47
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8.35	8,85	105,98
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,5	73,81	97,76

Tabel tersebut menyajikan tingkat kemajuan capaian kinerja Kecamatan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025–2029 berdasarkan indikator kinerja utama pada Tahun 2025. Data ini digunakan untuk menilai sejauh mana realisasi kinerja pada tahun berjalan telah mendukung pencapaian sasaran strategis jangka menengah.

Pada sasaran meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dengan target akhir RPJMD sebesar 77,5. Realisasi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mencapai 62,37, sehingga tingkat kemajuan yang dicapai sebesar 80,47%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan telah berjalan cukup baik dan berada pada jalur pencapaian target RPJMD, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan berkelanjutan agar target akhir dapat tercapai secara optimal.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Pelayanan Publik dengan target akhir RPJMD

sebesar 8,35. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencapai 8,85, sehingga tingkat kemajuan tercatat sebesar 105,98%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya memenuhi tetapi telah melampaui target akhir RPJMD. Hal ini mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui perbaikan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan prinsip pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sementara itu, pada sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, indikator yang digunakan adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target akhir RPJMD sebesar 75,5. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencapai 73,81, dengan tingkat kemajuan sebesar 97,76%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan dengan sangat baik dan hampir mencapai target akhir RPJMD. Hal tersebut didukung oleh penguatan akuntabilitas kinerja, perbaikan tata kelola organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan pada Tahun 2025 berada pada kategori baik hingga sangat baik. Sebagian besar indikator telah mendekati bahkan melampaui target akhir RPJMD 2025–2029, sehingga diperlukan strategi pemantapan dan peningkatan kinerja secara konsisten agar seluruh sasaran strategis dapat tercapai secara optimal pada akhir periode RPJMD.

3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini sampai dengan Realisasi kinerja di level nasional

Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Jombang 2025	Realisasi JawaTimur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	62,37	76.49	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,85	8.56	N/A	N/A
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	73,81	N/A	N/A	N/A

Tabel 5 menyajikan perbandingan realisasi kinerja Kecamatan dengan standar atau capaian pada tingkat Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada Tahun 2025. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran posisi kinerja Kecamatan dalam konteks yang lebih luas serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada sasaran meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan. Realisasi kinerja Kecamatan tercatat sebesar 62,37, sementara realisasi pada tingkat Kabupaten Jombang Tahun 2025 mencapai 76,49. Perbedaan nilai ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan masih berada di bawah capaian rata-rata kabupaten, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja. Data pembanding pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional belum tersedia (N/A), sehingga analisis perbandingan baru dapat dilakukan pada level kabupaten.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Pelayanan Publik. Realisasi kinerja Kecamatan mencapai 8,85, lebih tinggi dibandingkan realisasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar 8,56. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan berada di atas rata-rata kabupaten dan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kecamatan dalam menerapkan standar pelayanan, meningkatkan responsivitas aparatur, serta memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Data pembanding pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional juga belum tersedia.

Sementara itu, pada sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, indikator yang digunakan adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Realisasi kinerja Kecamatan sebesar 73,81. Namun, data pembanding pada tingkat Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, maupun Nasional belum tersedia (N/A), sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan secara komprehensif. Meskipun demikian, nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan telah berjalan dengan baik dan berada pada kategori yang cukup tinggi.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan publik, kinerja Kecamatan telah melampaui capaian Kabupaten Jombang, sementara pada aspek kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan capaian kabupaten. Keterbatasan data pembanding di tingkat provinsi dan nasional menjadi catatan penting untuk penguatan sistem pengukuran kinerja ke depan, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

3.1.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Sumobito sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2025-2029 Kecamatan Sumobito yakni: Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Sumobito melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Sumobito langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sumobito senantiasa berupaya mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi, responsivitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keterukuran.

- a. Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi, khususnya di bidang pelayanan publik, yang disampaikan secara benar, jelas, dan tidak diskriminatif, dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Prinsip responsivitas tercermin dari kemampuan aparatur dalam mengantisipasi berbagai potensi permasalahan, dinamika, serta perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.
- c. Prinsip efisiensi diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga mampu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- d. Prinsip efektivitas ditunjukkan melalui kemampuan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui proses dan cara kerja yang paling tepat dan optimal.
- e. Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan memastikan bahwa setiap kegiatan serta hasil akhir dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Prinsip keterukuran diwujudkan melalui penetapan target kinerja yang jelas dan

terukur, disertai dengan indikator serta mekanisme pencapaian yang dapat dievaluasi secara objektif.

Selanjutnya, dalam analisis efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Sumobito melaksanakan setiap kegiatan dan kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan riil kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia, dengan tetap berpedoman pada prinsip efektivitas dan efisiensi guna mendukung pencapaian sasaran kinerja secara optimal. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.6.1
Efisiensi Anggaran

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Kinerja	Anggaran	TINGKAT EFISIENSI
			% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	83,16	92,47	(9,31)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	108,58	99.96	8,62
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	101,17	91,87	9,3
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA			97,63	92,47	5,16

Tabel 3.2.2.2
Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tujuan/Sasaran	Indikator	KINERJA TAHUN 2025			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025			Keterangan
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	Tingkat Efisiensi SDM	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	62,37	83,16	Sesuai kebutuhan jabatan struktural dan pelaksana	Relatif mencukupi	Efisiensi	Pelaksanaan tugas berjalan optimal meskipun terdapat keterbatasan pada jabatan tertentu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,15	8,85	108,58	Didukung jabatan pelayanan dan administrasi	Mencukupi	Sangat Efisien	SDM mampu memberikan kinerja optimal dan melampaui target pelayanan
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	72,95	73,81	101,17	Didukung jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana	Mencukupi	Efisiensi	Pembagian tugas berjalan efektif sesuai hasil ANJAB
RATA - RATA CAPAIAN IKU				97,63	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		Efisiensi	Pemanfaatan SDM selaras dengan beban kerja dan sasaran kinerja

Tabel 3.2.2.3
Efisiensi Aset

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	PENGADAAN PERIODE JAN-DES 2024	P-RKBMD 2025		% ketersediaan	Keterangan
				STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Portable Generating Set	1	0	1	0	100	efisiensi
2	Pompa Air	1	0	1	0	100	efisiensi
3	Station Wagon	2	0	2	0	100	efisiensi
4	Sepeda Motor	10	0	10	0	100	efisiensi
5	Lemari Penyimpanan	1	0	1	0	100	efisiensi
6	Lemari Besi/Metal	2	0	2	0	100	efisiensi
7	Lemari kayu	5	0	5	0	100	efisiensi
8	Rak Besi	2	0	2	0	100	efisiensi
9	Filling Cabinet Besi	2	1	8	0	37,5	Kurang efisiensi
10	CCTV-camera control,TV system	1	0	1	0	100	efisiensi
11	Papan Visual/Papan Nama	1	0	1	0	100	efisiensi
12	Mesin Absensi	1	0	1	0	100	efisiensi
13	LCD Projector/Infocus	1	0	1	0	100	efisiensi
14	Mesin Antrian	1	0	2	1	100	efisiensi
15	Papan Tulis	1	0	1	0	100	efisiensi

16	Kursi Besi/Metal	8	0	8	0	100	efisiensi
17	Meja Rapat	3	0	5	0	60	Cukup efisiensi
18	Tempat Tidur Kayu	1	0	1	0	100	efisiensi
19	Meja ½ Biro	3	0	3	0	100	efisiensi
20	Kursi Rapat	20	0	70	0	28,57	Kurang efisiensi
21	Kursi Tamu	3	0	3	0	100	efisiensi
22	Kursi Putar	7	0	7	0	100	efisiensi
23	Bangku Tunggu	2	0	2	0	100	efisiensi
24	Lemari Es	1	0	1	0	100	efisiensi
25	A.C. Split	5	1	8	2	100	efisiensi
26	Televisi	2	0	2	0	100	efisiensi
27	Sound System	3	0	3	0	100	efisiensi
28	Lambang Garuda Pancasila	1	0	1	0	100	efisiensi
29	Gambar Presiden /wakil Presiden	1	0	1	0	100	efisiensi
30	Tiang Bendera	1	0	1	0	100	efisiensi
31	Mimbar/Podium	1	0	1	0	100	efisiensi
32	Gorden	1	0	1	0	100	efisiensi

33	Alat Pemadam/portable	2	0	2	0	100	efisiensi
34	Meja Kursi Pejabat es III	1	1	3	1	100	efisiensi
35	Meja Kursi Pejabat es IV	4	0	4	0	100	efisiensi
36	Kursi Tamu depan ajudan	2	0	2	0	100	efisiensi
37	Audio Amplifier	1	0	1	0	100	efisiensi
38	Microphone/Wireless	2	0	2	0	100	efisiensi
39	Camera Elektronik	1	0	1	0	100	efisiensi
40	Layar Film/Projector	1	0	1	0	100	efisiensi
41	Telephone Mobile	1	0	1	0	100	efisiensi
42	PC Unit	5	0	5	0	100	efisiensi
43	Laptop	6	1	8	1	100	efisiensi
44	Monitor	1	0	1	0	100	efisiensi
45	Printer	8	1	10	1	100	efisiensi
46	Scanner	2	1	3	0	100	efisiensi
47	Router	0	2	2	0	100	efisiensi
48	Peralatan computer Lainnya	1	0	1	0	100	efisiensi
49	Peralatan Permainan Lainnya	0	1	1	0	100	efisiensi
	RATA -RATA					96%	

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sumobito Tahun 2025, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Sumobito mendapatkan anggaran sebesar Rp3.184.197.550 dengan realisasi anggaran mencapai Rp2.944.519.815 atau serapan dana APBD mencapai 92,47% sehingga dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran silpa Rp. 239.677.735 Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.7

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	3.184.197.550	2.944.519.815	92,47
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	235.495.100	235.415.350	99.96
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	2.948.702.450	2.709.104.465	91,87

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	62,37	83,16	3.184.197.550	2.944.519.815	92,47
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan	8,15	8,85	108,58	235.495.100	235.415.350	99.96

		Publik (Indeks)						
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	72,95	73,81	101,17	2.948.702.450	2.709.104.465	91,87
Rata-Rata Capaian					97,63			

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis telah berjalan dengan baik, didukung oleh pengelolaan anggaran yang relatif efektif dan efisien. Mayoritas indikator kinerja utama mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,63%, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Dari sisi kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif menunjukkan hasil yang sangat positif karena capaian indikatornya berada di atas 100%. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan. Sementara itu, kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan telah menunjukkan capaian yang baik, meskipun masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dari sisi anggaran, tingkat realisasi anggaran berada pada kisaran 91,87% hingga 99,96%, yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab. Tingginya tingkat serapan anggaran ini menandakan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta selaras dengan pencapaian kinerja.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran sudah cukup seimbang, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan tata kelola birokrasi di tingkat kecamatan dapat berjalan efektif dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Sumobito tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.2.1.2
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN SUMOBITO TAHUN 2025

N O	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,5	71,7	97,55	2.948.702.450	2.709.104.465	91,87
2	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76	70,34	92,55	14.241.850	14.227.000	99,90

3	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75	68,75	91,67	114.394.050	114.359.350	99,97
4	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49	28,17	57,49	13.779.700	13.756.000	99,83
5	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75	29,17	38,89	80.765.000	80.765.000	100,00
6	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75	37,5	50,00	12.314.500	12.308.000	99,95

3.2.2 Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2025 target sasaran strategis Kecamatan Sumobito dapat tercapai dengan rata - rata capaian kinerja 97,63 % dengan kata lain kinerja kecamatan sudah tercapai akan tetapi masih perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam pemenuhan dokumen dan laporan kegiatan yang mana harus selalu dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya.

1. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Sumobito Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan tercapainya bahkan terlampauinya target pada beberapa indikator utama. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten serta berorientasi pada hasil dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan transparansi dan pengawasan internal, sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan dan prinsip good governance.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan capaian kinerja.
4. Perbaikan kualitas pelayanan publik, melalui penyederhanaan prosedur, penerapan standar pelayanan, serta peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan dan pengaduan masyarakat.
5. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai, sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Faktor-faktor pendukung tersebut secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Kecamatan Sumobito dan menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

2. Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- **Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Kinerja**

Meskipun capaian kinerja Kecamatan secara umum menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa aspek kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab sebagai berikut:

1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Aspek penunjang urusan pemerintah daerah belum mencapai target maksimal meskipun persentase capaian tergolong tinggi. Hal ini disebabkan masih adanya keterbatasan dalam optimalisasi fungsi penunjang, seperti perencanaan, pengelolaan administrasi, serta dukungan teknis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dan pelaporan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, sehingga capaian kinerja belum dapat mencapai nilai optimal sesuai bobot yang ditetapkan.

2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Capaian pada aspek ini masih berada pada kategori cukup, namun belum mencapai target optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh kompleksitas tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, masih terdapat kendala dalam penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja, sehingga dampak kegiatan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum sepenuhnya maksimal.

3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Belum optimalnya capaian aspek pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan disebabkan oleh belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat serta perbedaan kapasitas kelembagaan desa dan kelurahan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan waktu dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi menyebabkan program pemberdayaan belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian masyarakat.

4. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rendahnya capaian pada aspek pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur kecamatan, luasnya wilayah binaan, serta beragamnya permasalahan dan kapasitas pemerintahan desa. Selain itu, intensitas monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan.

5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian yang rendah pada aspek ini disebabkan oleh koordinasi lintas sektor yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya pendukung turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

6. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

Aspek ketentraman dan ketertiban umum menunjukkan capaian terendah. Hal ini dipengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, serta perlunya sinergi yang lebih kuat dengan aparat keamanan dan perangkat daerah terkait. Kondisi sosial masyarakat yang dinamis juga menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum secara optimal.

Secara umum, aspek-aspek yang belum mencapai target dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya serta kompleksitas tugas yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar bagi Kecamatan untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah, melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan guna meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya.

3. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

Sebagai tindak lanjut atas faktor-faktor penyebab kegagalan atau belum optimalnya kinerja, Kecamatan Sumobito telah dan akan melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan capaian aspek penunjang urusan pemerintah daerah, diperlukan penguatan fungsi perencanaan, administrasi, dan dukungan teknis secara lebih terintegrasi. Upaya perbaikan dilakukan melalui:

- Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih berbasis kinerja dan hasil evaluasi sebelumnya.
- Optimalisasi fungsi administrasi dan tata usaha sebagai pendukung utama pelaksanaan program dan kegiatan.
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan pelaporan kinerja.
- Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi serta laporan kinerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
- Penguatan koordinasi internal antar unit kerja untuk memastikan fungsi penunjang berjalan efektif dan efisien.

2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sebagai upaya meningkatkan capaian pada aspek ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang berfokus pada penyelarasan dan penguatan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain:

- Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Penguatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Pemantapan penerapan standar pelayanan dan SOP secara konsisten.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Upaya perbaikan pada aspek pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan diarahkan pada peningkatan peran kecamatan sebagai fasilitator dan koordinator, melalui:

- Peningkatan intensitas pembinaan dan pendampingan kepada desa dan kelurahan.
- Penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
- Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam pengelolaan program pemberdayaan.
- Peningkatan sinergi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- Penyesuaian metode pemberdayaan agar lebih adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan masing-masing desa dan kelurahan.

4. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk meningkatkan capaian pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, langkah perbaikan yang dilakukan meliputi:

- Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- Penyusunan jadwal pembinaan dan pengawasan yang lebih terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.
- Penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan pembinaan desa.
- Pendampingan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa secara lebih intensif dan berkesinambungan.

5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alternatif solusi untuk meningkatkan capaian pada aspek ini difokuskan pada penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, antara lain:

- Optimalisasi peran kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.
- Penguatan forum komunikasi dan koordinasi kewilayahan.
- Peningkatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum secara berkala.
- Penyusunan langkah-langkah preventif untuk mendukung stabilitas pemerintahan di wilayah kecamatan.

6. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

Upaya perbaikan pada aspek ketentraman dan ketertiban umum dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan preventif, yaitu:

- Penguatan sinergi dan koordinasi dengan unsur Forkopimcam, aparat keamanan, dan perangkat daerah terkait.
- Peningkatan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ketentraman dan ketertiban.

- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- Peningkatan pemantauan wilayah secara rutin untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini.
- Penyusunan langkah-langkah antisipatif terhadap dinamika sosial masyarakat.

4. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni:

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
3. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Kecamatan Sumobito menetapkan program,kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	71,7	97,55%	2.709.104.465	91,87	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	100%	13.719.100	100.00	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100%	11.755.100	100.00	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100%	1.964.000	99.35	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	100%	1.889.250.299	90,05	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	100%	1.889.250.299	89,70	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100%	70,647,000	100.00	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	100%	2.416.500	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	100%	94.679.425	99,40	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	100%	9.018.000	100.00	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	100%	16.710.600	100.00	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100%	33.000.000	100	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%	3.135.825	100.00	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100%	1.800.000	76,53	Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100%	31.015.000	100	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 laporan	100%	59.679.150	99,16	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	100%	59.679.150	99,16	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	100%	107.667.897	88,38	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100%	52.504,277	82,04	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	100%	55.163.620	95,41	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	100%	471.045.094	98,43	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	100%	41.919.000	91,60	Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100%	416.946.094	99,13	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	100%	12.180.000	100	Sangat menunjang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan	70,34%	92,55%	14.277.000	100	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-					
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100%	14.277.000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29,17%	38,89%	80.765.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	100%	32.765.000	100	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100%	48.000.000	100	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	28,17%	57,48%	13.756.000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	100%	13.756.000	100.00	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37,50%	50,00%	12.308.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	42 dokumen	100%	12.308.000	100	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68,75%	91,67%	114.359.350	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	126 lembaga	100%	10.734.650	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100%	103.624.700	100	Sangat menunjang

Secara umum, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan capaian kinerja output 100% dengan realisasi anggaran yang relatif tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan. Hal ini tercermin dari konsistensi antara target, realisasi indikator, serta dukungan anggaran yang memadai.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 97,55% dan realisasi anggaran 91,87%. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa dukungan administratif, perencanaan, keuangan, dan sarana prasarana telah berjalan efektif dan menjadi fondasi utama keberhasilan kinerja perangkat daerah.

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah beserta sub kegiatannya (penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja) terealisasi 100%, yang menunjukkan bahwa siklus manajemen kinerja (perencanaan–pelaksanaan–pelaporan–evaluasi) telah berjalan optimal.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penatausahaan dan pelaporan keuangan, juga terealisasi penuh. Meski terdapat persentase realisasi anggaran di bawah 100% pada beberapa sub kegiatan, hal tersebut lebih mencerminkan efisiensi anggaran, bukan kegagalan kinerja.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah menunjukkan bahwa dukungan operasional kantor tersedia secara memadai. Ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan penunjang ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini mencatat capaian aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar 92,55% dengan realisasi anggaran 100%. Sub kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan terlaksana sepenuhnya, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas koordinasi, pelayanan kepada masyarakat, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Program ini sangat menunjang keberhasilan kinerja pelayanan publik.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Meskipun capaian indikator aspek pemerintahan umum masih berada pada kisaran 38,89%, seluruh kegiatan dan sub kegiatan terealisasi 100% baik dari sisi output maupun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan sesuai rencana, namun hasil capaian indikator masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika sosial, tingkat partisipasi masyarakat, serta kompleksitas isu persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, program ini tetap sangat menunjang, namun memerlukan penguatan strategi agar dampaknya lebih optimal.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini menunjukkan peningkatan capaian indikator hingga 57,48% dengan realisasi anggaran 100%. Kegiatan koordinasi penegakan peraturan daerah dan sinergi dengan aparat terkait berjalan optimal dan berkontribusi positif terhadap stabilitas wilayah. Program ini sangat menunjang pencapaian kinerja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian aspek pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencapai 50,00%, dengan seluruh kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa terealisasi 100%. Program ini berperan penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan akuntabilitas keuangan desa, sehingga sangat menunjang keberhasilan kinerja kecamatan sebagai pembina dan pengawas desa.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini mencatat capaian indikator yang tinggi yaitu 91,67% dengan realisasi anggaran 100%. Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan serta peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat terlaksana sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa program ini

sangat efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat pembangunan berbasis desa dan kelurahan.

Berdasarkan keseluruhan tabel, dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan tergolong sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan menghambat atau menyebabkan kegagalan kinerja. Adapun capaian indikator yang belum maksimal pada beberapa program lebih disebabkan oleh faktor eksternal dan karakter indikator outcome yang membutuhkan proses jangka menengah hingga panjang, bukan karena lemahnya pelaksanaan program atau rendahnya dukungan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama dan indikator pendukung yang sebagian besar telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja berada pada kategori baik hingga sangat baik.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan telah dilaksanakan secara cukup efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pada aspek pelayanan publik dan reformasi birokrasi menunjukkan hasil yang sangat positif, menandakan meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat serta semakin kuatnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Di sisi lain, meskipun capaian kinerja pada aspek kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan telah berada pada kategori baik, masih terdapat ruang perbaikan yang perlu terus diupayakan, khususnya dalam peningkatan konsistensi perencanaan dan pelaporan kinerja, optimalisasi monitoring dan evaluasi, serta penguatan kapasitas aparatur. Upaya perbaikan berkelanjutan juga telah dilakukan terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, yang menunjukkan capaian kinerja sebesar 97,55%, sebagai wujud komitmen dalam memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum kinerja instansi pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi seluruh unsur organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, LKjIP Tahun 2025 ini menjadi wujud pertanggungjawaban kinerja instansi kepada pemangku kepentingan serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Ke depan, instansi

berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima serta tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

4.2 Inovasi dan penghargaan

Inovasi kegiatan evaluasi dan pembinaan rutin oleh pemerintah kecamatan sumobito kepada perangkat desa se Kecamatan Sumobito, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur desa di Kecamatan Sumobito, adapun inovasi tersebut diberi nama “Valentine Sumobito”.

Valentine Sumobito merupakan inovasi pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang digagas oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sumobito sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan rutin kepada Kaur Pemerintahan Desa se-Kecamatan Sumobito. Inovasi ini dilaksanakan secara terjadwal dan berkelanjutan, yaitu setiap hari Selasa pada minggu ke-2 setiap bulan, sehingga menjadi forum pembinaan yang konsisten dan terstruktur.

Inovasi Valentine Sumobito dirancang sebagai ruang koordinasi, pembelajaran, dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Kaur Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui forum ini, Kecamatan Sumobito tidak hanya melakukan evaluasi administrasi pemerintahan desa, tetapi juga memberikan pendampingan langsung agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelaksanaan Valentine Sumobito, pemerintah desa memperoleh berbagai manfaat nyata, antara lain meningkatkan pemahaman dan kemampuan Kaur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, memperluas wawasan serta pengetahuan terkait regulasi terbaru di bidang pemerintahan, hukum, dan pelayanan publik, serta menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi desa secara langsung. Permasalahan tersebut kemudian dibahas bersama untuk dicarikan solusi yang tepat, baik melalui pembinaan teknis oleh kecamatan maupun dengan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan substansi permasalahan yang muncul.

Dari sisi tata kelola, Valentine Sumobito berfungsi sebagai media early warning system terhadap potensi permasalahan administrasi pemerintahan desa, sehingga dapat dicegah sejak dini sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Forum ini juga memperkuat peran Kecamatan Sumobito sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus memastikan keselarasan antara kebijakan kabupaten dengan pelaksanaan di tingkat desa.

Selain itu, inovasi Valentine Sumobito berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa dan kecamatan, khususnya pada aspek administratif pemerintahan. Dengan meningkatnya kompetensi aparatur desa, proses pelayanan administrasi kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Inovasi ini juga menjadi ruang yang mendorong kreativitas dan lahirnya inovasi pelayanan publik di

tingkat desa, karena Kaur Pemerintahan Desa diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik (best practice), gagasan, dan solusi inovatif yang dapat direplikasi oleh desa lain.

Secara keseluruhan, Valentine Sumobito merupakan inovasi strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi dan pembinaan rutin, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Inovasi ini sejalan dengan upaya Kecamatan Sumobito dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang prima, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Inovasi Valentine Sumobito memiliki hubungan yang erat dan strategis dengan peningkatan kinerja Kecamatan Sumobito, karena secara langsung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Valentine Sumobito berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melalui kegiatan evaluasi dan pembinaan rutin kepada Kaur Pemerintahan Desa, kecamatan memastikan bahwa kebijakan, regulasi, serta standar operasional prosedur yang ditetapkan dapat dipahami dan diterapkan secara seragam di seluruh desa. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pemerintahan desa dengan ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya memperkuat kinerja kecamatan dalam aspek pembinaan pemerintahan desa.
5. Inovasi ini mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah, khususnya dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Permasalahan administrasi, hukum, dan pelayanan yang teridentifikasi melalui forum Valentine Sumobito dapat segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Mekanisme ini membantu kecamatan dalam melakukan pengendalian internal serta memperbaiki kualitas output dan outcome kinerja, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kecamatan dan nilai evaluasi AKIP.
6. Valentine Sumobito berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan meningkatnya kapasitas dan pemahaman aparatur desa, proses pelayanan administrasi kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik desa yang semakin baik akan mengurangi beban penanganan masalah di tingkat kecamatan, sehingga kecamatan dapat lebih fokus pada fungsi koordinasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas pelayanan lintas desa.
7. Inovasi Valentine Sumobito memperkuat peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan. Forum rutin ini menjadi media komunikasi dua arah antara kecamatan dan desa, yang mempercepat penyampaian informasi, kebijakan, serta umpan balik dari desa. Hubungan kerja yang harmonis dan kolaboratif ini meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

8. Secara perspektif pengukuran kinerja, Valentine Sumobito berkontribusi pada peningkatan capaian indikator kinerja kecamatan, khususnya indikator yang berkaitan dengan pembinaan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan umum, dan pelayanan publik. Inovasi ini menjadi praktik baik (best practice) yang menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja, sehingga memberikan nilai tambah dalam penilaian kinerja kecamatan secara keseluruhan.

Dengan demikian, inovasi Valentine Sumobito tidak hanya menjadi kegiatan pembinaan rutin, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang memperkuat kinerja Kecamatan Sumobito secara menyeluruh. Inovasi ini berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, efektivitas pelayanan publik, serta koordinasi antara kecamatan dan desa, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di tingkat kecamatan.

4.3 Upaya Perbaikan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis Kecamatan, secara umum rata-rata capaian kinerja sebesar 97,63% menunjukkan kinerja organisasi berada pada kategori baik–sangat baik. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target optimal sehingga diperlukan langkah perbaikan berkelanjutan. Upaya-Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Indikator ini menunjukkan capaian sebesar 83,16%, yang meskipun tergolong baik, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Upaya perbaikan yang dilakukan dan perlu terus ditingkatkan antara lain:

- Penguatan perencanaan kinerja, melalui penyelarasan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja) agar lebih fokus pada hasil (outcome oriented).
- Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja, khususnya pada sub kegiatan strategis yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan indeks kinerja kecamatan.
- Peningkatan kapasitas aparatur, melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait penyusunan laporan kinerja dan pengelolaan program.
- Optimalisasi koordinasi lintas seksi dan desa, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan capaian indeks kinerja kecamatan pada periode berikutnya.

2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Indikator ini memperoleh capaian 108,58%, yang menunjukkan kinerja pelayanan publik telah melampaui target. Upaya perbaikan dan penguatan yang dilakukan meliputi:

- Penyederhanaan dan standarisasi prosedur pelayanan, guna meningkatkan kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat.
- Peningkatan kompetensi petugas layanan, khususnya dalam aspek sikap pelayanan, responsivitas, dan pemanfaatan teknologi informasi.
- Pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih nyaman dan mudah diakses.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan telah berjalan efektif dan perlu dipertahankan serta dikembangkan.

3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Capaian indikator ini sebesar 101,17%, mencerminkan terwujudnya tata kelola birokrasi yang semakin bersih dan efektif. Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, melalui penguatan sistem pelaporan kinerja dan pengendalian internal.
- Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pelayanan publik.
- Penguatan budaya kinerja dan integritas aparatur, melalui pembinaan disiplin, etika kerja, dan komitmen terhadap reformasi birokrasi.
- Penyempurnaan tata laksana dan proses bisnis, agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi lebih efektif dan efisien.

Upaya tersebut berkontribusi signifikan dalam meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi di tingkat kecamatan.

Adapun perbaikan yang dilakukan terhadap Indikator kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 97,55% menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, perbaikan dan penyempurnaan tetap dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Upaya perbaikan yang dilaksanakan meliputi:

- Penyempurnaan perencanaan kinerja, melalui peningkatan keterkaitan (cascading) antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan agar lebih berorientasi pada hasil dan manfaat.

- Peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, dengan memastikan kesesuaian antara target, realisasi, serta analisis capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja perangkat daerah.
- Penguatan monitoring dan evaluasi internal, khususnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penunjang, sehingga potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih dini.
- Peningkatan kapasitas aparatur pengelola SAKIP, melalui pembinaan dan pendampingan teknis terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas.
- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.



Sumobito, 19 Januari 2026

HERU CAHYONO, S.Sos.,M.Si
NIP 19680803 199003 1 011